

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tingkat kejadian bencana yang tinggi. Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang sebagai “laboratorium bencana” dikarenakan terdapat beragam kebencanaan. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi yang paling banyak dilanda bencana periode tahun 2016-2020 sebanyak 3.693 kejadian dan menempati posisi pertama dalam bencana alam (Ayu Rizaty, 2021).

Dalam menghadapi bencana, tentunya diperlukan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) serta kapasitas dan ketahanan yang kuat dalam segala lapisan, terutama masyarakat yang rentan terhadap bencana. Kesadaran PRB telah berkembang secara global, melihat Indonesia memiliki kaitan dengan keadaan darurat dan bencana (Pertiwi et al., 2020:1). Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional yang tidak mengikat yakni *Sendai Framework Action (SFA) 2015-2030* dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2006 yang telah diterapkan Perka BNPB No.14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Tentunya hal tersebut perlu diaktualisasikan dalam PRB yang inklusif guna menekan korban jiwa akibat dampak dari bencana alam.

SFA mengatur terkait PRB dan memiliki perubahan terpenting dimana masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas termasuk aktor yang penting harus dianggap sebagai pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam PRB (Pertiwi et al., 2020:1). Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Retno Widiastutik¹ selaku narasumber, bahwa terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan PRB inklusif pada tahun 2015-2016, sebab kurangnya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terkait PRB yang inklusif kepada masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, wanita, serta lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa akibat bencana alam. Tentunya, terdapat beberapa hambatan para penyandang disabilitas apabila dihadapi dengan bencana alam. Dalam merespon hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otonomi daerah untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dalam PRB. Salah satu kerjasama tersebut ialah kerjasama internasional antara BPBD Jawa Tengah dengan INGO yakni ASB (*Arbeiter Samariter Bund*).

Secara singkat, ASB merupakan INGO berbasis bantuan kemanusiaan inklusif yang berasal dari Negara Jerman dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2006. Salah satu fokus dalam ASB yakni mendukung segala usaha pemerintah baik daerah maupun pusat dalam membangun ketahanan, peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat melalui program PRB yang inklusif. Sebagai salah satu pendiri DiDRRN (*Disability-inclusive Disaster Risk Reduction*

¹ Wawancara dengan Ibu Retno Widiastutik, S.Si, MPWK selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Jawa Tengah melalui platform media sosial pada Sabtu, 16 Juli 2021 jam 14.00 WIB.

Network), ASB berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dalam PRB inklusif serta mengimplementasikan nilai aksi prioritas yang terdapat di SFA (ASB, 2020). Berangkat dari argumen penulis, maka penulis lebih jauh ingin menganalisis bagaimana peran ASB dalam mendukung BPBD Jawa Tengah guna meningkatkan kapasitas masyarakat disabilitas pada bidang PRB inklusif serta dampak setelah kehadiran ASB dalam peningkatan kapasitas masyarakat difabel untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut ialah “bagaimana peran ASB dalam menginklufitaskan PRB guna meningkatkan kapasitas BPBD Jawa Tengah dan partisipasi penyandang disabilitas?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian ini dan dibedakan menjadi dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana peran INGO melalui kerjasama dengan pemerintah sub-nasional.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASB dalam menginklufitaskan PRB untuk meningkatkan kapasitas BPBD Jawa Tengah dan partisipasi penyandang disabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan dari penelitian ini yang dikategorikan menjadi dua, yakni kegunaan akademis dan praktis:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi perluasan dan perkembangan kajian-kajian akademis tentang kerjasama INGO dengan pemerintah level sub-nasional serta pengurangan risiko bencana yang inklusif.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan pengambil kebijakan (khususnya di tingkat Pemerintahan Provinsi) dalam upaya meningkatkan kapasitas dan partisipasi penyandang disabilitas untuk PRB yang inklusif

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat disabilitas untuk mengurangi risiko bencana, terdapat beberapa penelitian dahulu yang membantu penelitian ini. Pertama, penelitian dari Farabi dan Susiatiningsih (2016) yang menjelaskan mengenai strategi INGO DFTW (*Domes for The World*) dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di Yogyakarta, Indonesia. Tulisan tersebut menjelaskan

mengenai bagaimana kerjasama antara INGO lokal dan internasional dengan pemerintah daerah terkait pemberian bantuan kemanusiaan dari INGO dengan menggunakan strategi komunikasi berupa rumah kubah yang disebut sebagai *Monolithic Ecoshells* sebagai model bangunan yang tahan akan bencana untuk para korban pasca gempa di Yogyakarta tahun 2006.

Kedua, penelitian dari Santoso et al (2013) yang menjelaskan mengenai disabilitas dan bencana menggunakan *Agenda Setting* dan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa munculnya alternatif-alternatif kebijakan yang melahirkan kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif berbasis *right on* untuk diterapkan oleh para aktor-aktor yang terlibat menjadi kebijakan yang tepat. Ketiga, penelitian dari Rizki et al (2020) yang menjelaskan mengenai analisis kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai masih belum optimal dalam penanggulangan bencana daerah. Karena terdapat beberapa program kebencanaan yang kurang optimal serta faktor lainnya yang mempengaruhi.

Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap tiga penelitian di atas. Dimana persamaannya yakni penulis menggunakan beberapa konsep yang terdapat dari penelitian dahulu sebagai alat analisis penelitian ini. Kemudian perbedaan yang terletak pada penelitian ini yakni melihat bagaimana permasalahan daerah dapat diatasi melalui kerjasama *sub-government* dan INGO. Peran INGO memberikan *insight* dalam PRB inklusif baik bagi penyandang disabilitas maupun lembaga

terkait, sehingga kondisi yang sebelumnya rentan dapat menjadi berkapasitas. Adapun konsep yang akan digunakan dalam mengkaji rumusan masalah ini ialah konsep kerjasama interanasional, konsep pengurangan risiko bencana inklusif, serta konsep kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

1.5.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan yang melalui batas-batas suatu negara dengan berlandaskan struktur yang jelas serta diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang telah disetujui bersama, baik pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada suatu negara yang berbeda (Rudy, 1993:3). Kerjasama internasional terdiri dalam beberapa bidang seperti bidang sosial, politik, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, sehingga menimbulkan berbagai kepentingan yang beraneka ragam kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial, dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah tersebut maka aktor-aktor internasional membangun adanya kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2005:33).

Kerjasama internasional dapat dilakukan oleh beberapa aktor selain negara, terdapat juga seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional atau INGO. J.C. Johari (dalam Rudy, 2016:71) mengatakan bahwa cakupan lingkup hubungan internasional dapat dikatakan luas yaitu mempelajari berbagai hubungan atau korelasi, baik antar negara maupun asosiasi, organisasi non-pemerintah, dan hubungan yang dari yang bersifat politik sampai non-politik seperti ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan hidup, dan bantuan kemanusiaan seperti pengurangan resiko bencana.

Menurut Rudy (2016:6-7) apabila dilihat dari aktor non-negara, terdapat pembagian yang sangat luas dan beragam dalam kehidupan umat manusia, misalnya seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan. Selain 4 bidang yang disampaikan penulis, terdapat salah satu badan dalam bagian dari organisasi internasional, yaitu UNDRR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*), yang bertugas dalam membidangi kegiatan Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR, 2021). Menurut Holsti (1988:652-653) kerjasama internasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya harapan antara dua atau lebih terkait sebuah kepentingan, nilai, atau sebuah tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, diwujudkan, atau dipenuhi oleh semua aktor sekaligus.
- b. Adanya harapan dari negara bahwa sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara akan membantu negara lain dalam mencapai kepentingannya.
- c. Adanya sebuah persetujuan atau masalah khusus antara dua negara atau lebih dalam memanfaatkan sebuah persamaan kepentingan.
- d. Adanya aturan resmi dan tidak resmi terkait transaksi pada masa depan yang dilakukan agar dapat melaksanakan suatu persetujuan.
- e. Adanya transaksi antar negara untuk memenuhi suatu kepentingan.

Kerjasama internasional juga masuk ke dalam *multi-track diplomacy* yang dikembangkan oleh John McDonald menjadi sembilan *track* yang merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi. Diantara sembilan track tersebut, terdapat salah satu track yakni *Track Two (Nongovernment/Professional)*. Dimana *track*

tersebut mengatakan bahwa *non-government* atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional *non-governmental* untuk menganalisis, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan negara (McDonald, 2012:60-61). Dalam penelitian ini, yang dimaksud ialah INGO (*International Non-Governmental Organization*) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mencegah serta mengurangi terjadinya risiko akibat bencana alam.

Seperti yang telah dibicarakan penulis di atas, berkembangnya aktor dalam kerjasama internasional membuka jalan bagi pemerintah daerah dan INGO untuk melakukan kerjasama internasional. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memiliki hak yakni otonomi daerah. Menurut Syarif (dalam Susiatiningsih et al., 2018:2) bahwa otonomi daerah dapat mewujudkan berbagai kepentingan bagi pemerintah daerah, diantaranya (1) Adanya peningkatan dalam keterlibatan publik dalam melakukan proses politik; (2) Peningkatan terhadap responsibilitas publik; (3) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah. Terdapat beberapa kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, diantaranya adalah paradiplomasi, bantuan kemanusiaan, pinjaman dan sumbangan dari pihak luar negeri melalui pemerintah pusat, kerjasama teknik, penanaman modal, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya (Ariadi, 2000:58).

Dalam konsepsi kerjasama internasional di atas, MD & Anwari (2002: 183-184) memberikan penjelasan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan NGO

(*Non-Governmental Organization*) maupun INGO yang terbagi menjadi 2 bentuk:

(1) Hubungan yang bersifat *collaboration/cooperation*, hubungan ini pada dasarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan sesama pihak. Dimana pemerintah menganggap bahwa bekerjasama dengan NGO merupakan suatu keuntungan untuk kepentingan nasional. NGO dan pemerintah memiliki posisi yang sejajar.

Perwujudan kerjasama dalam hubungan ini dapat berupa pelatihan, sosialisasi, seminar, kegiatan lain yang bersifat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, (2) Hubungan yang bersifat *containment/dissolution*, hubungan ini merupakan hubungan yang dianggap sebagai sebuah tantangan. Pemerintah melihat NGO merupakan individu yang dianggap sebagai ancaman dalam pergerakannya, maka pemerintah mengambil tindakan bahwa NGO tersebut perlu adanya aksi pengawasan dan penekanan karena dapat menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat. Wujud dari hubungan ini dapat berupa NGO yang membawa aspirasi masyarakat dan melakukan pertentangan kepada pemerintah dengan landasan membawa kepentingan masyarakat yang perlu ditegakkan hak-haknya. Dasar pemikiran tersebut dapat digunakan atau termasuk dari bentuk NGO di level atau dalam skup internasional, yang disebut dengan INGO.

Berkaitan dengan INGO, INGO atau NGO merupakan organisasi yang tidak secara langsung dikendalikan oleh negara atau pemerintah, sebagian besar berkaitan dengan hak asasi manusia dari berbagai jenis (termasuk hak sipil dan politik, ekonomi dan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan), kepentingan profesional dan pekerjaan, dan berbagai kepentingan lainnya (Sklair, 2015:1). INGO muncul sebagai salah satu aktor penting dalam dua bidang yang saling

berhubungan. Pertama, dilihat dari tingkat nasional, INGO mendapatkan sebuah peran penting dalam bidang terkait masalah sosial, perkembangan ekonomi, kebijakan politik suatu negara tertentu dengan tujuan untuk memberikan bantuan yang lebih besar dalam bidang bencana, bantuan sosial, membangun kapasitas lokal, dan meningkatkan pengaruh politik pada suatu kebijakan yang terpinggirkan. Kedua, dalam tingkat internasional, peran tersebut menjadi semakin penting bagi NGO dalam menciptakan masyarakat sipil internasional, memberikan bantuan, menghidupkan rezim normatif informal namun kuat, kemudian mempengaruhi praktik dan kebijakan lembaga internasional (Brown & Moore, 2001). Seiring berkembangnya globalisasi, INGO dapat melakukan kerjasama internasional dengan pemerintah level sub-nasional atau biasa disebut dengan pemerintah daerah melalui berbagai bidang, salah satunya yakni Pengurangan Risiko Bencana Inklusif.

1.5.2 Pengurangan Risiko Bencana Inklusif

PRB (Pengurangan Risiko Bencana) inklusif merupakan PRB yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan partisipasi dan melindungi hak kelompok rentan bencana. Menurut Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2025) kelompok rentan bencana tersebut adalah penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, perempuan, dan anak-anak. PRB inklusif lahir dari peristiwa dimana penyandang disabilitas yang menerima dampak bencana tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kepentingannya sering diabaikan dan tidak terpenuhinya hak asasi manusia.

PRB inklusif mengadaptasi prinsip-prinsip utama dalam pembangunan yang inklusif yakni non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi. Non-diskriminasi yakni adanya konsep persamaan kesempatan, mengingat para penyandang

disabilitas tidak memiliki titik tolak yang sama. Maka perlu untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan PRB yang dapat menimbulkan hambatan baru bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yakni adanya pendukung dalam beberapa hal seperti transportasi, informasi, dan komunikasi yang digunakan dalam konteks PRB yang dapat diakses oleh kalangan penyandang disabilitas. Partisipasi sendiri merujuk kepada perlunya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan (Handicap International, 2014: 6).

Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2025) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor dalam permasalahan penyandang disabilitas mengakses manajemen bencana, antara lain: (1) Kurang adanya program persiapan bencana yang sensitif bagi penyandang disabilitas; (2) Kurangnya aksesibilitas informasi dan materi terkait PRB. Informasi yang tersedia kurang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu seperti tuna netra, tuna rungu, gangguan intelektual; (3) Dalam tindakan penyelamatan ketika terjadi bencana, lingkungan terdekat penyandang disabilitas kurang cepat dan tepat dalam membantu evakuasi; (4) Kurangnya pendataan yang spesifik mengenai identitas dan kondisi penyandang disabilitas. Menurut Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2035) terdapat beberapa kegiatan dalam PRB inklusif bagi penyandang disabilitas, yakni :

- a. Situasi Sebelum Bencana: terdapat beberapa kegiatan kesiapsiagaan yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana seperti melakukan koordinasi dan diskusi dengan komunitas/ organisasi penyandang disabilitas terkait risiko bencana, membuat pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas saat

terjadinya bencana, serta melatih penyandang disabilitas terkait kegiatan PRB inklusif.

- b. Situasi Saat Bencana: terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan saat terjadinya bencana seperti melakukan evakuasi bagi penyandang disabilitas, menampung di pengungsian, membawa korban ke rumah sakit, melakukan pendataan, serta memberikan terapi untuk mengurangi rasa trauma.
- c. *Early Recovery*: dalam PRB inklusif terdapat beberapa kegiatan seperti melibatkan diri secara aktif dalam posko pemberian layanan dalam bencana serta memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk menyelamatkan diri sendiri.
- d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: kegiatan yang dilakukan dalam fase ini ialah melaksanakan penilaian kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam bidang ekonomi dan sarana prasarana, melakukan konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas.

Pengurangan risiko bencana tentunya erat kaitannya dengan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana, pada sub-bab selanjutnya akan menjelaskan mengenai konsep kapasitas dalam PRB.

1.5.3 Kapasitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari semua kekuatan yang ada pada suatu kelompok masyarakat, sosial, atau organisasi yang dapat mengurangi dampak dari suatu risiko atau dampak dari suatu bencana (UN/ISDR, 2004:16). Kapasitas dalam konsep PRB dianalisis sebagai hubungan kekuatan dari macam

sumber daya tersebut oleh beragam kelompok berisiko dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman (Annisa & Setyowati, 2019: 86). Tujuan utama dari kapasitas ialah untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya melalui pengembangan kapasitas individu, kelembagaan dan masyarakat yang dapat menahan kerugian atau kerusakan (UN/ISDR, 2004:41). Karena, suatu risiko atau ancaman pada dasarnya berakar pada kondisi kerentanan fisik sosial, ekonomi dan lingkungan yang perlu dikaji dan dikelola secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas menurut ACBF (*African Capacity Building Foundation*) (dalam Fauzi, 2016:65) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat dalam menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah, kebutuhan, isu, serta peluang; kemudian memformulasikan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam *Capacity Building*. Menurut Warsito (dalam Dwihastari, 2017:4) terdapat beberapa faktor, diantara lain:

- a. Komitmen bersama. Komitmen merupakan dasaran utama yang dikembangkan secara berkelanjutan serta perlu pemeliharaan secara baik, karena sebagai dasar dalam melakukan proses kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi serta komponen yang berada di dalamnya.
- b. Kepemimpinan. Dalam hal ini, faktor kepemimpinan memiliki peran untuk menjadi tonggak inisiasi untuk menyukseskan program dalam pembangunan kapasitas baik secara individu maupun kelembagaan sebuah organisasi.

- c. Reformasi peraturan. Merupakan peraturan yang disusun dalam sebuah organisasi yang berupaya mendukung agar pembangunan kapasitas agar dapat dilaksanakan secara konsisten.
- d. Reformasi kelembagaan. Pada dasarnya reformasi ini menunjuk pada adanya hubungan budaya kerja untuk mendukung pengembangan kapasitas. Seperti menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan karyawan lainnya serta atasan.
- e. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk pengembangan kapasitas.

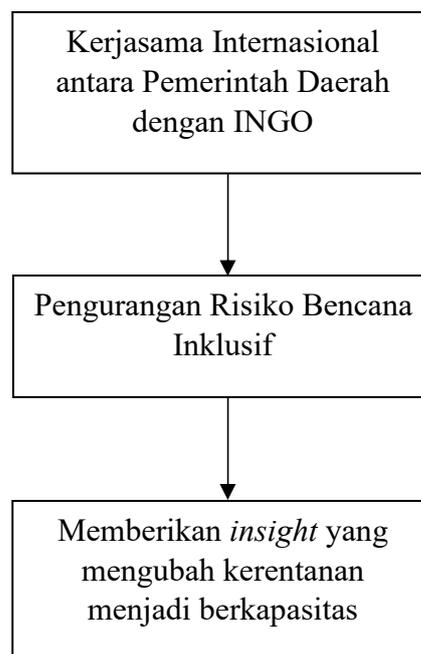
Menurut IIRR& Cordaid (dalam Prihananto & Muta'ali, 2013:10) mengelompokkan kapasitas yang terdiri dari: (a) kapasitas terhadap mitigasi, merupakan upaya maupun tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana; (b) Kapasitas terhadap kesiapan, yakni kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi bencana yang terjadi; (c) Kapasitas bertahan hidup, yakni kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi bencana. Konsep kapasitas dalam penelitian ini yang diteliti yakni pengetahuan, sikap, dan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memungkinkan mereka mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi dampak buruk, atau memulihkan diri dari bencana.

1.5.4 Skema Alur Penelitian

Dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dilakukan oleh beberapa aktor selain negara, yakni pemerintah daerah dengan INGO. Kerjasama internasional tersebut dilakukan dalam bidang pengurangan

risiko bencana inklusif dengan harapan peran yang diberikan INGO memberikan insight, baik bagi penyandang disabilitas maupun lembaga terkait, sehingga kondisi yang sebelumnya rentan dapat menjadi berkapasitas. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat disampaikan dalam bentuk bagan skema alur pikir berikut ini:

Gambar 1. 1 Bagan Skema Alur Pikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kerjasama Internasional

Pada penelitian ini, penulis mendefinisikan konsep kerjasama internasional dengan menggabungkan definisi dari J.C. Johari (dalam Rudy, 2016:71), Holsti (1988:652-653), dan MD & Anwari (2002: 183-184) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini, sehingga menghasilkan definisi konseptual kerjasama internasional sebagai suatu kerjasama yang memiliki dua sifat, dapat dilakukan oleh beberapa

aktor baik nasional maupun internasional, kemudian menciptakan sebuah kerjasama yang bersifat politik sampai non-politik, serta kerjasama tersebut dapat menghasilkan sebuah harapan, persetujuan, dan/atau transaksi yang mana secara langsung dapat memenuhi kepentingan yang diperlukannya.

1.6.1.2 Pengurangan Risiko Bencana Inklusif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi PRB inklusif yang dikemukakan oleh Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2025) yang memiliki relevansi sama dalam penelitian ini. Kemudian melahirkan definisi PRB inklusif yakni terdapat kelompok yang rentan apabila terjadi sebuah peristiwa bencana dan terkadang kepentingannya sering diabaikan dan tidak terpenuhi seperti penyandang disabilitas, lansia, dan lain-lain. Maka dalam memenuhi hal tersebut, terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung kelompok rentan tersebut dalam PRB yang inklusif.

1.6.1.3 Kapasitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis menggabungkan pendapat dari (Annisa & Setyowati, 2019: 86), ACBF (dalam Fauzi, 2016: 65), dan Warsito (dalam Dwihastari, 2017: 4) yang memiliki kesesuaian topik dengan penelitian ini. Definisi kapasitas dalam PRB melalui penggabungan dari tiga pakar di atas yakni hubungan kekuatan dari sumber daya yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman. Dalam meningkatkan kapasitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas.

1.6.1.4 Ancaman

Ancaman atau bahaya merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang berbahaya, sehingga memiliki peluang atau potensi yang mengancam adanya kehilangan korban jiwa dan/ atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan (CBSE, 2006:4). Merujuk pada dunia kebencanaan, ancaman perlu diketahui untuk membuat perencanaan pengurangan dampak bencana lebih efektif yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan asal terjadinya yakni ancaman bencana alam, ancaman buatan, ancaman teknologi, serta ancaman sosial. Bencana alam sendiri disebabkan oleh fenomena alam (geologi, meteorologi, biologi) seperti angin topan, tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi yang notabennya bersumber dari alam. Ancaman buatan merupakan ancaman yang terjadi karena ulah manusia seperti limbah, polusi, bendungan yang rusak, peristiwa perang, dan lain-lain. Ancaman sosial diakibatkan oleh tindakan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan sehingga menyebabkan peristiwa bencana alam. Terakhir yakni ancaman teknologi, dimana ancaman yang berasal dari teknologi industri, kecelakaan, transportasi, kegagalan prasarana dan aktivitas khusus manusia hingga menyebabkan gangguan dan dampak serius bagi lingkungan atau manusia.

1.6.1.5 Kerentanan

Kerentanan merupakan suatu kondisi yang ditentukan oleh beberapa proses atau faktor seperti fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya (UN/ISDR, 2004: 16). Kerentanan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dari kumpulan masyarakat atau komunitas yang menunjukkan arah atau dampak mengakibatkan ketidakmampuan

untuk menghadapi ancaman dan bahaya (BAKORNAS, 2007: 11). Kerentanan juga dapat berkurang atau bertambah tergantung pada tindakan yang diambil atau peristiwa yang terjadi. Dengan mengambil tindakan untuk kesiapsiagaan pada bencana, dampak negatif yang ditimbulkan akan berkurang, karena kerentanan layaknya sebuah kemungkinan dan konsekuensi yang dapat dipelajari dan diukur (Coppola, 2015: 192). Kerentanan dibagi menjadi dua, yakni kerentanan fisik dan kerentanan sosial-ekonomi. Kerentanan fisik mencakup gagasan tentang siapa dan apa yang dapat dirusak atau dihancurkan oleh bencana alam. Hal ini didasarkan pada kondisi fisik orang tersebut dan elemen-elemen yang berisiko, seperti bangunan, infrastruktur, lokasi, dan sifat bahaya. Kerentanan juga berkaitan dengan kemampuan teknis bangunan dan struktur untuk menahan gaya yang bekerja padanya dalam peristiwa bencana. Kerentanan sosial-ekonomi mengacu pada sejauh mana suatu populasi terkena dampak bencana tidak hanya dalam hal komponen fisik kerentanan tetapi juga dalam hal kondisi sosial ekonomi. Misalnya, orang miskin yang tinggal di tepi laut tidak punya uang untuk membangun rumah beton yang kuat. Ketika ada angin kencang atau angin topan, mereka biasanya dalam bahaya dan kehilangan tempat berteduh. Karena kemiskinan, mereka tidak dapat membangun kembali rumah mereka (CBSE, 2006:5).

1.6.2 Definisi Operasional

Mendasari definisi konseptual yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kerjasama internasional antara Provinsi Jawa Tengah dan ASB. Dengan demikian, maka data yang perlu diketahui yaitu:

- a. Bentuk dan contoh kerjasama yang dilakukan antara Provinsi Jawa Tengah dengan ASB.
- b. Latar belakang yang mendasari dilakukannya kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan ASB.
- c. Proses atau mekanisme kerjasama tersebut yang dilakukan antara Provinsi Jawa Tengah dengan ASB.
- d. Beberapa upaya ASB dengan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan SFDRR ke dalam PRB inklusif.
- e. Bagaimana sifat dan dampak yang dihasilkan dalam kerjasama tersebut.

2. Pengurangan Risiko Bencana Inklusif

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada PRB inklusif yang dilakukan oleh ASB dengan BPBD Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat rentan. Dengan demikian, maka data yang perlu diketahui yakni:

- a. Mengetahui hak-hak penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- b. Mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam PRB inklusif.

- c. Mengetahui bagaimana proses kegiatan atau upaya untuk mendukung kelompok rentan dalam PRB inklusif.

3. Kapasitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

Penelitian ini menggunakan PRB inklusif untuk meningkatkan kapasitas yang dapat ditinjau peningkatan tersebut melalui kapasitas dalam PRB bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, data yang perlu diketahui yakni :

- a. Mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas
- b. Mengetahui upaya kesiapsiagaan lembaga dan penyandang disabilitas sebelum terjadinya bencana.

1.7 Argumen Penelitian

Dari latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun dan menghasilkan argumen penelitian, yaitu peran ASB dalam menginklusi PRB dapat meningkatkan kapasitas BPBD Jawa Tengah dan partisipasi penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kegiatan kerjasama dengan fokus pengurangan risiko bencana inklusif. Peran ASB membawa perubahan yang kondisi awalnya rentan menjadi berkapasitas.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Bogdan & Taylor (dalam Nugrahani, 2014:89) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang dapat

menciptakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis hendak melakukan analisis secara mendalam menggunakan informasi yang didapatkan dengan dasar konsep yang digunakan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan solusi berbasis data terhadap masalah saat ini dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data (Narbuko & Achmadi, 2015: 44).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah dengan melakukan wawancara individu kepada pihak yang bersangkutan seperti penyandang disabilitas, staff BPBD Jawa Tengah, dan staff ASB dalam kerjasama untuk peningkatan kapasitas dalam bidang PRB inklusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kualitatif yakni melalui teks dan kata-kata tertulis dalam memberikan penjelasan dan menjawab terhadap fenomena yang diteliti oleh penulis. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti narasumber, peristiwa atau aktivitas, dan dokumen-dokumen yang tersedia (Nugrahani, 2014:212).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data melalui dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Data

primer dapat berupa wawancara dengan narasumber selaku informan dalam penelitian ini. Informan tersebut yakni dari Pihak ASB, pengurus unit LiDi PB (Layanan Inklusif Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana) Jawa Tengah, dari unsur BPBD Jawa Tengah, dan unsur luar lainnya. Kemudian data sekunder dalam pengumpulan informasi yang hendak digunakan dalam penelitian ini yaitu internet/*online research* yang tercantum di dalam metode pengumpulan *desk research*. Penulis hendak memakai studi literatur berbagai macam jenis dokumen, seperti koran, majalah, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya (Nugrahani, 2014: 13).

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Untuk mengetahui jangkauan penelitian dan juga batasan-batasan untuk menganalisis, tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2015 pada saat dilakukannya kerjasama internasional antara ASB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait hingga tahun 2018. Dalam kurun waktu tersebut terdapat beberapa proses kegiatan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas serta partisipasi penyandang disabilitas melalui PRB inklusif masih berlaku hingga saat ini.

1.8.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif kongruen. Menurut George & Bennett (dalam Rosyidin, 2019:61) metode kongruen adalah dengan mencocokkan antara konsep dan data. Penulis berlandaskan konsep yang digunakan kemudian menguji konsep tersebut dalam mengungkapkan atau memprediksi dalam kasus tertentu. Konsep ini mengemukakan hubungan antara varian dalam variabel dependen dan independen kemudian digunakan

sebagai penyaring data. Dengan kata lain, metode ini menganalisis pada logika sebab-akibat yang berlandaskan dari konsep penulis dengan mengaitkan konsep yang ada yang akan menjadi alat untuk menyaring/ filter data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan. Data yang disajikan penulis adalah data yang berkesesuaian dengan konsep dan argumen penulis.